PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS KOMUNIKASI, INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
Jalan Kenari No. 56 Yogyakarta, KodePos 55165 Telp. (0274) 515865, 562682
EMAIL : kominfosandi@jogjakota.go.id
HOTLINE SMS : 081 2278 0001; HOTLINE EMAIL: upik@jogjakota.go.id;
WEBSITE : www.jogjakota.go.id

Media: Kedaulatan Rakyat Hari: Kamis Tanggal: 26 Desember 2024 Halaman: 2

GULIRKAN PROGRAM NASIONAL MAKAN BERGIZI SEHAT

Hadapi Anomali Anggaran, Pastikan Skala Prioritas

YOGYA (KR) - Seiring dengan diluncurkannya program nasional makan bergizi sehat atau Makan Bergizi Gratis (MBG) oleh pemerintah pusat, maka Pemkot Yogya harus sudah bersiap. Terutama dalam menghadapi anomali anggaran dengan memastikan skala prioritas yang harus dipenuhi pada APBD 2025.

Wakil Ketua DPRD Kota Yogya Triyono Hari Kuncoro, mengungkapkan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) maka konsekuensi logis digulirkannya program nasional makan bergizi sehat akan mempengaruhi keuangan daerah. "Sesuai UU HKPD maka keuangan daerah akan terpengaruh. Ini sudah menjadi konsekuensi logis," ungkapnya, Rabu (25/12).

Menurut politisi PKS ini, Pemkot Yogya mendapatkan porsi sharing anggaran yang cukup besar. Kisarannya menyentuh angka 11 persen. Hal ini karena Kota Yogya masuk kategori kapasitas fiskal tinggi. Jika dirupiahkan maka besaran sharing tersebut mencapai sekitar Rp 102 miliar. Anggaran tersebut harus bisa dialokasikan demi keberlangsungan program nasional yang dijalankan di Kota Yogya.

KR-Istimewa

Triyono Hari Kuncoro

Pada sisi lain, imbuh Kuncoro, tahun depan Pemkot Yogya juga akan mendapatkan tambahan pendapatan dari opsen pajak kendaraan bermotor. Akan tetapi refocusing anggaran harus tetap dilakukan walaupun tidak sedarurat pada saat pandemi Covid-19 lalu. "Ini tentunya akan berimbas pada kinerja. Sekarang pertanyaannya, prioritas anggaran seperti apa yang akan diskenariokan," tandasnya.

Melalui skema refocusing maka akan ada pos anggaran yang digeser maupun volume yang dikurangi. Ketika pengurangan tersebut menyentuh pada pos kegiatan yang ada di wilayah maka dipastikan akan mendapatkan komplain dari masyarakat. Hal ini karena tidak sedikit masyarakat yang sudah mengusulkan kegiatan melalui musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang) secara berjenjang. Tentunya, kegiatan kewilayahan sudah sangat dinanti oleh masyarakat. "Berarti Pemkot Yogya harus memastikan skala prioritas anggaran yang harus dipenuhi pada APBD 2025," katanya.

Kuncoro juga menekankan, pada awal tahun 2025 mendatang bakal ada pelantikan kepala daerah terpilih hasil Pilkada 2024. Secara politik anggaran, hal itu pun akan mempengaruhi postur perubahan APBD 2025 lantaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang juga harus diselesaikan. "Berharap ada Dana Alokasi Khusus (DAK) untuk menopang keuangan daerah. Tetapi sepertinya itu sangat kecil bisa terpenuhi atau bahkan mustahil," jelasnya. **(Dhi)-f**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005